

Konflik, Otoritas, dan Identitas: Reinterpretasi Sahabat Nabi dalam Wacana Islam Masa Kini

Hurin'in AM¹, Abdullah Munir²

Affiliation^{1,2,3} (^aSekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan

(Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan)

Email: iin@stitmakrifatulilmi.ac.id, abdullahmunir@stitmakrifatulilmi.ac.id

Keywords: write

Companions of the Prophet, Islamic historiography, ḥadīth, religious authority.

Kata Kunci: Sahabat Nabi, historiografi Islam, hadis, otoritas keagamaan.

Abstract:

The study of the Companions of the Prophet (Ṣaḥābat al-Nabī, peace be upon him) occupies a central position in ḥadīth studies and Islamic historiography. This research aims to re-examine the construction of the definition of the Companions as mapped by Fu'ad Jabali in his work Sahabat Nabi: Siapa, ke Mana, dan Bagaimana? (The Companions of the Prophet: Who They Were, Where They Went, and How They Acted), which analyzes the roles, geographical distribution, and political alliances of the Companions, particularly in the context of the Battle of Ṣiffīn. This study employs a qualitative-descriptive approach through content analysis of primary and secondary sources, including classical biographical dictionaries and literature on the science of ḥadīth. The findings indicate that the definition of the Companions is a historical construct closely intertwined with political interests and the development of ḥadīth scholarship. The mapping of the Companions' migrations and political tendencies reveals that conflicts in early Islam were driven more by religious-ideological confrontations than by mere tribal loyalties. The relevance of this study is particularly significant for contemporary contexts, especially in understanding the crisis of religious authority, identity polarization, and the simplification of history within modern religious discourse. These findings underscore the importance of a critical reading of Islamic history as a foundation for religious literacy in the digital era.

Abstrak:

Kajian tentang Sahabat Nabi Saw memiliki posisi sentral dalam studi hadis dan historiografi Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis ulang konstruksi definisi Sahabat sebagaimana dipetakan oleh Fu'ad Jabali dalam karyanya Sahabat Nabi: Siapa, ke Mana, dan Bagaimana? yang menelaah peran, distribusi geografis, dan aliansi politik Sahabat, khususnya dalam konteks Perang Shiffin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui analisis isi terhadap teks primer dan sekunder, termasuk kamus biografi klasik dan literatur ilmu hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa definisi

Sahabat merupakan konstruksi historis yang erat dengan kepentingan politik dan perkembangan ilmu hadis. Pemetaan migrasi Sahabat dan kecenderungan politik mereka mengungkap bahwa konflik pada masa awal Islam lebih merupakan benturan ideologi keagamaan dibanding sekadar loyalitas suku. Relevansi kajian ini sangat kuat bagi situasi kontemporer, terutama dalam memahami krisis otoritas keagamaan, polarisasi identitas, dan penyederhanaan sejarah dalam wacana keagamaan modern. Temuan ini mempertegas pentingnya pembacaan kritis terhadap sejarah Islam sebagai fondasi literasi keagamaan pada era digital.

A. introduction

Kajian mengenai Sahabat Nabi Saw merupakan fondasi bagi pemahaman atas otoritas hadis dan sejarah Islam awal. Dalam tradisi keilmuan Islam, status Sahabat memiliki konsekuensi langsung terhadap validitas sanad hadis serta pembentukan hukum dan teologi. Namun, sebagaimana ditunjukkan oleh Fu'ad Jabali, definisi "Sahabat" tidaklah tunggal, melainkan dibentuk melalui proses panjang yang melibatkan perdebatan epistemologis dan politik. (Fadlilah, 2012) Ahli hadis memperluas definisi untuk melindungi kelangsungan riwayat, sementara kelompok-kelompok rasionalis seperti Mu'tazilah justru mempersempitnya demi menjaga integritas transmisi. Keragaman ini menunjukkan bahwa konsep Sahabat bukanlah entitas tetap, tetapi narasi yang dinegosiasikan sepanjang sejarah.

Selain itu, distribusi geografis Sahabat dan keterlibatan mereka dalam Fitnah besar Islam awal menegaskan kompleksitas relasi politik dan ideologi yang membentuk sejarah tersebut. Perang Shiffin, salah satu titik balik sejarah Islam, menjadi konteks penting yang menunjukkan bagaimana jaringan sosial, kepentingan politik, dan visi keagamaan berperan dalam pembentukan otoritas religius.

Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung fokus pada aspek teologis Sahabat, terutama perdebatan tentang 'adālat al-ṣaḥābah, otoritas periwayatan, dan legitimasi mereka dalam transmisi hadis. Literatur klasik maupun kontemporer lebih banyak menekankan legitimasi normatif, sementara dimensi struktural seperti pola migrasi, aliansi suku, relasi patronase, dan konfigurasi

geografis kekuasaan jarang diangkat sebagai variabel analitis yang berdiri sendiri. Padahal, sejumlah pembacaan kritis historiografi modern (misalnya pada Motzki, 2010; Brown, n.d.) telah menunjukkan bahwa sejarah Islam awal tidak hanya dibentuk oleh doktrin, tetapi juga oleh dinamika sosial-politik yang kompleks.

Di sisi lain, perdebatan akademik juga muncul antara para sarjana yang melihat konflik antar-Sahabat sebagai persoalan teologis-moral (misalnya kecacatan pribadi atau penyimpangan etika) dan mereka yang membaca konflik tersebut sebagai pertarungan ideologis yang lebih dalam, terkait struktur kekuasaan dan jaringan sosial pada masa awal Islam. Karya-karya studi hadis tradisional lebih menekankan perlindungan integritas Sahabat, sedangkan sarjana historiografi menawarkan pendekatan demografis, statistik, dan geospasial untuk memahami konteks sosial mereka.

Oleh karena itu, penelitian ini mengisi ruang kosong tersebut dengan menelaah konstruksi historiografis Sahabat dalam karya Fu'ad Jabali, yang memadukan biografi klasik, pemetaan geografis, serta analisis dinamika politik. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya pemahaman tentang sejarah Islam awal, tetapi juga membuka ruang bagi pembacaan baru yang relevan dengan dinamika keislaman saat ini, terutama dalam konteks krisis otoritas keagamaan, polarisasi identitas, dan penyederhanaan narasi sejarah dalam wacana publik Muslim kontemporer.

1. Teori Konstruksi Sosial Otoritas Keagamaan

Konsep otoritas keagamaan dalam masyarakat Muslim tidak terbentuk secara alamiah, melainkan melalui proses konstruksi sosial yang melibatkan berbagai aktor, wacana, dan institusi. (Berger, n.d. & Luckmann (1966) menyebut bahwa realitas sosial *-including religious authority-* dibangun melalui *externalization, objectivation, dan internalization*. Dalam konteks studi Islam, otoritas keagamaan mengakar pada legitimasi historis, narasi tradisi, serta kontrol atas produksi pengetahuan.

Kategori "Sahabat Nabi" adalah contoh paling jelas bagaimana sebuah identitas keagamaan dikonstruksi secara sosial. Ia tidak hanya merujuk pada

hubungan personal dengan Nabi, tetapi menjadi simbol otoritatif yang dilembagakan dalam disiplin hadis dan fikih. (Foucault, 1977) menegaskan bahwa pengetahuan dan kekuasaan saling membentuk yang berarti bahwa definisi Sahabat tidak pernah lepas dari dinamika wacana dan otoritas pada abad pertama hingga ketiga Hijriah.

Dengan demikian, teori konstruksi sosial penting digunakan untuk memahami bagaimana status “Sahabat” dan otoritas mereka dalam periwayatan hadis dibentuk, dinegosiasikan, dan dipertahankan dalam sejarah Islam.

2. Historiografi Islam dan Kritik Sumber

Historiografi Islam modern menuntut pembacaan ulang atas sumber-sumber klasik dengan pendekatan kritik historis. Sejarawan seperti Humphreys (1991), Donner (2010), dan Motzki (2010) menekankan perlunya memeriksa bias redaksional, konteks politik, serta proses transmisi dalam sumber-sumber seperti *Tarikh al-Tabari*, *Ansāb al-Ashrāf*, *al-Iṣābah*, atau *Kitāb al-Ṭabaqāt al-Kubrā*. Kritik sumber (*source criticism*) difokuskan pada kronologi penulisan, keterlibatan penulis dalam konflik teologis, kebergantungan antar-sumber, dan rekonstruksi intensi politik di balik teks.

Metodologi Fu’ad Jabali sejalan dengan pendekatan historiografi modern yang tidak hanya menggunakan sumber klasik secara deskriptif, tetapi juga mengekstraknya menjadi data kuantitatif misalnya jumlah Sahabat di suatu wilayah, keterlibatan mereka dalam perang, atau pola hunian pasca-penaklukan. Pendekatan ini mengikuti tradisi *prosopography*, yaitu studi sistematis tentang kelompok historis melalui analisis biografi. Pendekatan tersebut memberi dimensi baru dalam studi Sahabat, yang sebelumnya lebih bersifat normatif-teologis.

3. Teori Aliansi Politik dan Ideologi Keagamaan

Dalam ilmu sosial politik, aliansi terbentuk melalui kombinasi kepentingan kolektif, kedekatan identitas, dan dinamika institusional. Teori aliansi (Snyder, 1997) menjelaskan bahwa kelompok membentuk koalisi berdasarkan ancaman bersama, sumber daya, dan orientasi ideologis. Jika diterapkan dalam studi Islam awal, konflik antar-Sahabat tidak dapat direduksi

menjadi persaingan suku semata, tetapi berkaitan dengan struktur kekuasaan pasca-Nabi, migrasi dan penyebaran kaum Muslim ke wilayah baru, kompetisi mengenai arah teologis komunitas, dan legitimasi atas konsep kepemimpinan (*imāmah/khilāfah*).

Fu'ad Jabali menunjukkan bahwa konflik seperti Perang Shiffin lebih merupakan benturan dua visi keagamaan yaitu kelompok yang dekat dengan misi profetik *versus* kelompok yang berkembang dalam struktur politik pasca-Utsman. Temuan ini sejalan dengan pendapat Madelung (1997) yang melihat bahwa konflik abad pertama memiliki basis ideologis yang lebih dalam dibanding sekadar tribalitas.

Dengan demikian, teori aliansi politik memberikan kerangka untuk membaca ulang konflik Sahabat secara sosiologis, sementara teori ideologi religius menjelaskan motif spiritual dan teologis di balik pilihan politik mereka.

B. Methods

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan teknik analisis isi (*content analysis*). Sumber data terbagi menjadi:

1. Data primer: isi buku Fu'ad Jabali dalam karyanya *Sahabat Nabi: Siapa, ke Mana, dan Bagaimana?* dan kamus biografi klasik;
2. Data sekunder: penelitian mengenai sahabat, historiografi Islam, dan otoritas keagamaan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pembacaan mendalam, pencatatan tema, dan kategorisasi variabel tentang definisi, lokasi geografis, aliansi politik, dan posisi teologis. Analisis data dilakukan melalui reduksi, interpretasi tematik, dan penyajian naratif.

C. Analysis and Discussion

Definisi Sahabat sebagai Konstruksi Historis

Dalam kajian klasik, Sahabat sering dipahami sebagai generasi terbaik (*khayr al-qurūn*) yang hidup sezaman dengan Nabi dan menjadi perantara

utama transmisi sunnah.(Alkhotob, 2018) Namun Fu'ad Jabali secara tajam menunjukkan bahwa definisi tersebut tidak bersifat final, melainkan konstruksi historis yang terus mengalami negosiasi sepanjang sejarah intelektual Islam. Pengamatan ini penting karena selama berabad-abad, istilah "Sahabat" cenderung diperlakukan sebagai fakta objektif dan teologis, padahal ia lahir melalui kontestasi epistemik dan politik yang cukup panjang.

Pada masa Nabi Muhammad, istilah "Sahabat" (*ṣaḥābī*) belum menjadi kategori teoretis. Relasi antara Nabi dan para pengikutnya bersifat organik, cair, dan tidak mengharuskan adanya klasifikasi formal. Tidak ada dokumen normatif pada masa Nabi yang menjelaskan siapa yang bisa disebut Sahabat, tingkatan mereka, ataupun implikasi keagamaan dari status tersebut. Justru definisi ini menguat seiring perkembangan ilmu hadis dan kebutuhan untuk menata otoritas periwayatan setelah wafatnya Nabi.(Udin & Fitriyadi, 2023)

Sejarawan hadis abad kedua dan ketiga Hijriah, seperti Ibn Hanbal, al-Bukhari, dan Muslim, memegang peranan besar dalam memperluas definisi Sahabat. Mereka memasukkan hampir semua orang yang pernah melihat Nabi walau hanya sekali ke dalam daftar Sahabat. Motifnya bukan semata teologis, tetapi juga metodologis semakin luas definisi, semakin banyak sanad hadis yang dianggap sah.

Pelebaran definisi ini sekaligus menyederhanakan persoalan integritas individu. Dalam metodologi ahli hadis, semua Sahabat dianggap adil (*'udūl*), sehingga tidak diperlukan kritik terhadap karakter atau riwayat hidup mereka. Hal ini memperkuat stabilitas sistem transmisi hadis, meskipun secara historiografis menimbulkan problem karena menutup ruang kritik terhadap perilaku politik beberapa Sahabat dalam sejarah.

Jonathan Brown (2014) menjelaskan bahwa pada abad ketiga Hijriah, *'adālat al-ṣaḥābah* menjadi prinsip metodologis yang tidak terpisahkan dengan upaya membangun otoritas hadis sebagai pilar utama hukum Islam. (Hirschler & Brown, n.d.) Dengan demikian, definisi Sahabat berfungsi sebagai fondasi epistemik untuk menopang legitimasi hadis sebagai sumber ajaran Islam.

Berbeda dari ahli hadis, kelompok rasionalis seperti Mu'tazilah, sebagian ulama fikih, dan sejumlah sejarawan klasik lebih berhati-hati dalam menetapkan status Sahabat. Mereka menekankan bahwa melihat Nabi tidak otomatis menjadikan seseorang otoritatif dalam agama. Kriteria yang mereka ajukan lebih ketat, antara lain:

1. kedekatan intens dengan Nabi,
2. pemahaman mendalam terhadap ajaran,
3. komitmen moral yang konsisten,
4. akses langsung pada proses pembentukan komunitas Muslim awal.

Alih-alih menerima ratusan hingga ribuan nama sebagai Sahabat, kelompok ini hanya mengakui figur-figur sentral yang betul-betul terlibat dalam perjuangan Nabi. Pembatasan ini muncul sebagai kritik epistemologis agar otoritas hadis tidak terlalu longgar dan terjebak dalam problem rekonstruksi sejarah yang tidak akurat.

Perbedaan antara ahli hadis dan kelompok rasionalis mencerminkan adanya tarik-menarik antara *klaim kebenaran ilmiah* dan *kebutuhan politik-ekonomis* dalam masyarakat Muslim awal. Motzki (2010) menyebut proses ini sebagai "konstruksi sosial otoritas," di mana produk keilmuan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial-politik yang melahirkannya.

Proses konstruksi "Sahabat" tidak terjadi dalam ruang kosong. Ia berkembang di tengah konflik politik pasca-Nabi, pertarungan legitimasi kepemimpinan, ekspansi teritorial yang membutuhkan struktur administrasi baru, serta munculnya aliran-aliran teologis.

Kelompok politik seperti Khawarij atau Syiah awal, misalnya, memiliki daftar Sahabat berbeda sesuai kebutuhan ideologis mereka. Khawarij meragukan integritas Sahabat yang terlibat dalam Perang Shiffin. Syiah menekankan keutamaan kelompok tertentu yang berpihak pada Ali, sedangkan Ahl al-Hadis memprioritaskan jumlah besar demi kekayaan sanad.

Dengan demikian, konstruksi Sahabat adalah proses sosial-historis yang kompleks, yang dipengaruhi kepentingan politik, persaingan epistemik, dan perkembangan institusi keilmuan. Analisis ini penting karena membuka

mata bahwa konsep Sahabat bukan teks beku, tetapi wacana yang terus dinegosiasikan.

Distribusi Geografis dan Migrasi Sahabat

Fu'ad Jabali memberikan kontribusi signifikan dengan memetakan persebaran geografis Sahabat setelah wafatnya Nabi. Berdasarkan analisis *prosopography* atas ribuan biografi dalam kitab *ṭabaqāt*, ia menemukan bahwa pusat-pusat hunian Sahabat terkonsentrasi di tiga wilayah utama: Suriah, Irak, dan Mesir.

1. Suriah: Basis Politik Bani Umayyah

Suriah muncul sebagai pusat terbesar migrasi Sahabat, terutama setelah penaklukan wilayah Syam dan penunjukan Mu'awiyah sebagai gubernur. (Maulidan et al., 2024) Suriah menawarkan stabilitas politik, dukungan suku kuat, serta peluang ekonomi yang besar. Banyak Sahabat, terutama dari kelompok Quraisy dan suku-suku selatan Arab, pindah ke wilayah ini.

Dominasi Suriah berpengaruh besar dalam pembentukan sejarah Islam, karena banyak riwayat dan narasi sejarah dibentuk oleh kelompok dekat Bani Umayyah. Kontrol Mu'awiyah terhadap struktur pemerintahan membuat Suriah menjadi episentrum produksi pengetahuan dan legitimasi politik pada masa itu.

2. Irak: Pusat Mobilitas Suku dan Ideologi

Irak -terutama Kufah dan Basrah- menjadi wilayah kedua terbesar. Kota-kota ini merupakan pusat komunitas tribal dari berbagai daerah, tempat berkumpulnya kaum veteran perang, pemikir, dan ahli fikih. Keragaman ini melahirkan dinamika intelektual yang intens dan sering berujung pada ketegangan politik.

Kufah, misalnya, dikenal sebagai basis pendukung Ali dan menjadi tempat lahirnya banyak diskursus teologis radikal seperti Khawarij dan Syiah. Irak memainkan peran besar dalam menciptakan wacana tandingan terhadap narasi Umayyah.

3. Mesir: Stabilitas Administratif dan Ekonomi

Mesir menjadi tujuan migrasi yang lebih stabil, dengan komposisi suku yang lebih homogen dibanding Irak. Sebagai pusat agrikultur dan administrasi strategis, Mesir menawarkan peluang ekonomi besar bagi Sahabat dan keturunan mereka. Meski tidak terlalu politis, Mesir menyumbang banyak riwayat hadis dan tradisi hukum di kemudian hari.

Migrasi Sahabat tidak sekadar perpindahan geografis, melainkan mencerminkan orientasi politik. Kelompok yang berpihak pada Utsman dan kemudian Mu'awiyah banyak bermukim di Suriah, sedangkan mereka yang dekat dengan tradisi Nabi di Madinah dan mendukung Ali lebih banyak berada di Irak. Namun Fu'ad menegaskan bahwa keragaman suku di wilayah-wilayah tersebut tidak secara otomatis menentukan afiliasi politik, sehingga mengesampingkan pandangan yang menyederhanakan konflik Islam awal sebagai konflik antar-suku.

Aliansi Politik dan Perang Shiffin

Perang Shiffin adalah salah satu konflik politik paling menentukan dalam sejarah Islam awal. Banyak sejarawan menganggapnya sebagai titik lahirnya sekte-sekte Islam, mulai dari Khawarij hingga Syiah. Fu'ad Jabali memberikan pembacaan baru terhadap peristiwa ini, menekankan bahwa konflik tersebut lebih merupakan benturan ideologi keagamaan daripada konflik suku atau ekonomi.

Fu'ad memetakan dua blok besar yang terlibat:

1. Kelompok yang dekat dengan misi profetik, terdiri dari para Sahabat awal yang menyaksikan fase Mekah dan Madinah. Mereka lebih menekankan moralitas, kesetaraan, dan integritas ajaran.
2. Kelompok yang dominan pada masa Utsman, yang memiliki jaringan politik kuat, akses ekonomi luas, dan posisi administratif penting di wilayah-wilayah penaklukan.

Pertarungan ini bukan sekadar perselisihan personal antara Ali dan Mu'awiyah. Ia mencerminkan perbedaan visi tentang bagaimana kekuasaan Islam harus dijalankan apakah berbasis moralitas profetik atau stabilitas administratif.

Meski tribalitas Arab memiliki peran dalam struktur sosial, Fu'ad menolak penjelasan yang menempatkannya sebagai penyebab utama konflik. Banyak suku mendukung Ali ataupun Mu'awiyah tidak berdasarkan asal-usul tribal, tetapi berdasarkan keselarasan ideologis dan pengalaman politik tertentu. Analisis ini sejalan dengan Madelung (1997), yang menyatakan bahwa konflik awal Islam adalah kontestasi legitimasi politik dan moralitas kepemimpinan, bukan sekadar pertarungan suku.

Pembacaan mendalam terhadap Perang Shiffin sebagaimana dipetakan oleh Fu'ad Jabali memperlihatkan bahwa konflik tersebut tidak dapat direduksi menjadi perseteruan personal atau rivalitas antar-suku, sebagaimana sering digambarkan dalam narasi populer. Sebaliknya, pertikaian ini mencerminkan benturan dua visi besar tentang arah perjalanan komunitas Muslim pasca-Nabi: visi moral-prophetik yang menekankan keadilan, egalitarianisme, dan integritas spiritual, bertemu dengan visi administratif-politik yang menekankan stabilitas, kontrol teritorial, dan konsolidasi kekuasaan.

Dengan menyingkirkan pendekatan yang terlalu menekankan tribalitas, Fu'ad menegaskan bahwa aliansi dalam Perang Shiffin dibangun melalui dinamika ideologis, pengalaman historis, dan orientasi politik aktor-aktornya, bukan sekadar solidaritas kesukuan. Pendekatan ini memperkaya pemahaman kita mengenai kompleksitas politik Islam awal karena menempatkan para Sahabat sebagai agen aktif yang beroperasi dalam konteks sosial dan ideologis yang saling bersaing.

Sejalan dengan analisis Madelung, konflik ini menunjukkan bahwa persoalan legitimasi kepemimpinan, visi moral, dan makna keadilan merupakan inti dari pergulatan politik Islam pada abad pertama Hijriah. Dengan demikian, Perang Shiffin dapat dibaca sebagai momen historis yang menandai lahirnya beragam aliran pemikiran dan orientasi politik dalam Islam, sekaligus menegaskan bahwa perbedaan pendapat adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan panjang tradisi Islam.

Relevansi terhadap Situasi Kontemporer

1. Krisis Otoritas Keagamaan

Perdebatan mengenai definisi Sahabat yang muncul sejak abad pertama Hijriah memberikan gambaran bahwa otoritas keagamaan tidak pernah hadir secara statis, tetapi merupakan hasil kontestasi wacana. Dalam sejarah Islam awal, otoritas antara ahli hadis dan kelompok rasionalis diperebutkan melalui mekanisme produksi pengetahuan, klaim legitimasi spiritual, dan penyusunan narasi sejarah.(Hidayah, 2015) Fenomena ini memiliki paralel yang jelas dalam masyarakat Muslim kontemporer, khususnya di era digital ketika otoritas tradisional kehilangan basis sosialnya dan digantikan oleh aktor-aktor baru yang beroperasi melalui media sosial.

Platform seperti YouTube, TikTok, Facebook, dan Instagram telah melahirkan figur keagamaan baru yang dikenal sebagai “ustaz media sosial.” Mereka memperoleh pengaruh tidak melalui otoritas institusional -seperti pesantren, fakultas syariah, atau otoritas fatwa- tetapi melalui kemampuan retorik, popularitas, dan logika algoritmik yang menentukan tingkat keterpaparan konten. Fenomena ini menimbulkan krisis otoritas karena masyarakat menghadapi banjir informasi dengan kualitas keilmuan yang tidak merata.

Sebagaimana dalam sejarah Islam awal, ketika pelebaran definisi Sahabat dimanfaatkan untuk memperkuat jaringan otoritas periwayatan, hari ini definisi otoritas juga semakin kabur. Siapa yang dianggap layak berbicara mengenai agama? Apakah seseorang yang memiliki latar pendidikan formal? Atau siapa saja yang memiliki jutaan pengikut di media sosial? Pertanyaan-pertanyaan ini mengingatkan pada konflik epistemik antara ahli hadis yang memperkuat otoritas melalui kuantitas sanad dan kelompok rasionalis yang menekankan kualitas intelektual dan moral sebagai syarat kepemimpinan agama(Hirschler & Brown, n.d.).

Selain itu, krisis otoritas ini membuka ruang bagi produksi klaim-klaim kebenaran yang tidak terverifikasi, mulai dari fatwa instan, pesan-pesan menyesatkan, hingga penyebaran hadis palsu yang dikemas sebagai konten viral. Studi terbaru oleh Kominfo Indonesia menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, kategori hoaks keagamaan selalu berada pada tiga besar topik yang

paling banyak beredar di media sosial. Fenomena tersebut semakin menegaskan kebutuhan akan pendekatan kritis terhadap otoritas keagamaan, sebagaimana ditunjukkan Fu'ad Jabali dalam pembacaan historiografinya terhadap Sahabat.

2. Polarisasi Identitas dan Politik Umat

Temuan Fu'ad mengenai Perang Shiffin sebagai benturan ideologi keagamaan memiliki relevansi kuat dengan polarisasi identitas dalam dunia Islam kontemporer. Konflik antara pengikut Ali dan Mu'awiyah bukan semata-mata konflik tribal atau personal, tetapi pertarungan mengenai arah keagamaan dan legitimasi kepemimpinan. (Nurdin, 2024) Pola ini masih dapat ditemukan dalam politik umat Islam hari ini, terutama ketika agama dijadikan sumber legitimasi politik.

Di Indonesia, misalnya, penggunaan simbol-simbol keagamaan telah menjadi bagian dari strategi politik identitas. Istilah seperti "khilafah," "ulama," "Sahabat Nabi," atau "pewaris salaf" sering dipakai untuk mengukuhkan posisi politik tertentu. Dalam beberapa kasus, kelompok-kelompok politik menggunakan narasi sejarah Islam secara selektif untuk memperkuat klaim otoritas dan moralitas, (Ginannafsih, 2024) serupa dengan cara kelompok-kelompok awal memanfaatkan sejarah Sahabat untuk memperkuat legitimasi mereka (Bruinessen, 2013).

Pemisahan identitas seperti "Sunni," "Syiah," atau "Salafi" juga merupakan bentuk polarisasi ideologis yang memiliki akar historis panjang. Polarisasi ini semakin diperkuat oleh media sosial, yang menciptakan *echo chamber* dan mempercepat radikalisasi wacana. Penelitian Pew Research Center (2017) menunjukkan meningkatnya segregasi opini di kalangan Muslim global mengenai otoritas keagamaan, bentuk negara Islam, hingga legitimasi kekerasan.

Mirip seperti Perang Shiffin, di mana kelompok berbeda mengklaim sebagai pewaris sah ajaran Nabi, kelompok-kelompok kontemporer juga bersaing untuk memonopoli kebenaran agama. Fu'ad menunjukkan bahwa narasi sejarah tidak pernah netral, dan sering digunakan untuk memperkuat posisi politik.

Pemahaman ini sangat penting untuk membaca secara kritis penggunaan sejarah Islam dalam perdebatan politik hari ini.

3. Pentingnya Literasi Sejarah

Literasi sejarah Islam menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi tantangan kontemporer. Kelompok ekstrem, baik yang berhaluan kanan maupun kiri, sering kali menyederhanakan sejarah untuk memperkuat klaim ideologis mereka. Narasi “generasi terbaik” (*khayr al-qurūn*) sering dipakai untuk menegaskan bahwa semua Sahabat adalah sosok ideal tanpa cacat, padahal Fu’ad Jabali menunjukkan bahwa mereka -seperti manusia lainnya- memiliki latar belakang sosial, pilihan politik, dan pandangan teologis yang sangat beragam.

Dalam tradisi Islam awal sendiri, konflik antar-Sahabat begitu nyata dan terekam dengan jelas. Perang Jamal, Perang Shiffin, insiden *tahkīm*, serta berbagai pemberontakan merupakan bukti bahwa perbedaan sangat wajar terjadi dalam komunitas manusia, termasuk komunitas Sahabat. Namun narasi-narasi ekstremis cenderung menghapus kompleksitas sejarah ini untuk memproduksi gambaran Islam yang monolitik.

Studi literasi sejarah Muslim di Asia Tenggara (Azra, 2019) menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman terhadap sejarah Islam awal membuat masyarakat rentan terhadap narasi simplistik yang disebarkan melalui media sosial. Banyak hoaks keagamaan memanfaatkan ketidaktahuan publik tentang proses historis pembentukan komunitas Muslim awal, termasuk dinamika Sahabat.

Pendekatan historiografis Fu’ad mengajarkan pentingnya menyelami konteks sosial-politik sejarah Islam, bukan hanya menerima narasi idealistik. Literasi sejarah dapat membentuk sikap kritis, mengurangi radikalisme, dan menghindarkan masyarakat dari manipulasi sejarah untuk kepentingan politik praktis.

4. Moderasi Beragama

Keberagaman internal Sahabat merupakan bukti historis bahwa perbedaan bukan ancaman, tetapi bagian integral dari kehidupan beragama. Fu’ad Jabali

menegaskan bahwa Sahabat bukanlah kelompok homogen. Mereka datang dari berbagai suku, kelas sosial, wilayah geografi, dan latar belakang ideologis. Sebagian merupakan pedagang, sebagian petani, sebagian mantan musuh Nabi, dan sebagian hanya bertemu Nabi sekali saja selama hidup mereka.

Pemahaman ini memiliki implikasi penting bagi konsep moderasi beragama. Moderasi bukanlah gagasan modern atau impor dari luar tradisi Islam. Ia justru merupakan kelanjutan dari pola keberagaman yang sudah hadir sejak masa Nabi sendiri. Beberapa contoh menunjukkan hal ini:

- Dalam fikih, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar sering berbeda pendapat.
- Dalam hadis, pendekatan Aisyah berbeda dengan Abu Hurairah.
- Dalam politik, Abu Musa al-Ash'ari dan Amr bin Ash berbeda posisi dalam isu tahkīm.

Fu'ad menunjukkan bahwa dinamika ini bukan tanda kelemahan, tetapi kekayaan intelektual umat Islam. Moderasi berarti mengakui pluralitas pemikiran sebagai bagian dari tradisi Islam yang sah. Pendekatan ini sejalan dengan visi Islam *wasathiyah* yang dianjurkan ulama Nusantara seperti Abdurrahman Wahid dan Azyumardi Azra. (Suhail et al., 2025)

Dalam konteks Indonesia, moderasi beragama menjadi sangat strategis untuk menjaga kohesi sosial di tengah meningkatnya intoleransi. UNESCO (2020) mencatat bahwa pendidikan moderasi yang mengintegrasikan kajian sejarah terbukti efektif mencegah radikalisme. Kajian Sahabat ala Fu'ad dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kurikulum moderasi karena memperlihatkan bahwa perbedaan sudah ada sejak awal dan tidak perlu diseragamkan.

Analisis terhadap konstruksi historis Sahabat yang ditawarkan Fu'ad Jabali menunjukkan bahwa dinamika sosial, politik, dan epistemik pada masa Islam awal memiliki relevansi langsung terhadap tantangan keagamaan masa kini. Krisis otoritas di era digital yang ditandai oleh munculnya figur-figur agama baru tanpa legitimasi ilmiah merefleksikan kembali bagaimana otoritas keagamaan selalu lahir melalui perdebatan dan negosiasi wacana. Polarisasi politik umat Islam saat ini, baik di Indonesia maupun di kawasan Muslim global, juga memperlihatkan pola serupa dengan konflik ideologis pada masa Perang

Shiffin, di mana simbol agama dan narasi sejarah dipakai sebagai alat legitimasi politik.

Dalam konteks kontemporer, literasi sejarah menjadi modal penting untuk menghadapi penyederhanaan narasi yang dilakukan kelompok ekstrem. Pemahaman bahwa Sahabat bukan kelompok tunggal, tetapi komunitas dengan keberagaman pengalaman dan pilihan politik, membantu umat untuk bersikap kritis terhadap narasi-narasi keagamaan yang terlalu monolitik. Di saat yang sama, keberagaman internal Sahabat justru menjadi landasan kuat bagi penguatan moderasi beragama. Ia menunjukkan bahwa pluralitas sudah menjadi bagian inheren dari tradisi Islam sejak awal, sehingga upaya moderasi bukanlah gerakan baru, tetapi kelanjutan dari dinamika sejarah Islam itu sendiri.

Dengan demikian, relevansi kajian Fu'ad bukan hanya pada aspek historiografinya, tetapi juga pada kontribusinya dalam membangun wacana keagamaan yang lebih matang, inklusif, dan sadar sejarah. Pendekatan kritis terhadap Sahabat dapat menjadi titik masuk penting untuk mengembangkan model keislaman yang responsif terhadap tantangan zaman sekaligus berakar kuat pada tradisi ilmiah Islam.

D. Conclusion

Pembacaan kritis terhadap konstruksi historis Sahabat sebagaimana ditawarkan Fu'ad Jabali memperlihatkan bahwa sejarah Islam awal tidak pernah berdiri di ruang hampa. Identitas Sahabat, distribusi geografis mereka, dan keterlibatan mereka dalam konflik politik seperti Perang Shiffin merupakan hasil interaksi kompleks antara visi keagamaan, dinamika kekuasaan, serta perubahan sosial pada masa ekspansi Islam. Temuan ini menegaskan bahwa otoritas keagamaan dan legitimasi politik pada abad pertama Hijriah dibangun melalui proses negosiasi yang terus berlangsung, bukan melalui konsensus tunggal sebagaimana sering diproyeksikan dalam wacana normatif.

Dalam konteks kontemporer, pemahaman semacam ini menjadi sangat relevan. Krisis otoritas di era digital, polarisasi identitas keagamaan, dan

maraknya penyalahgunaan sejarah menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi umat Islam hari ini memiliki akar panjang dalam dinamika masa awal Islam. Kajian literer-historis terhadap Sahabat mengajarkan bahwa perbedaan pendapat, kontestasi wacana, serta pergulatan ideologis adalah bagian alami dari tradisi intelektual Islam sejak awal. Karena itu, literasi sejarah dan sikap moderat menjadi kebutuhan penting agar umat mampu menghadapi derasnya arus informasi keagamaan, sekaligus menghindari jebakan simplifikasi dan radikalisasi.

Akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan historiografis seperti yang dirumuskan Fu'ad Jabali dapat menjadi fondasi penting bagi penguatan pemahaman keagamaan yang lebih kritis, inklusif, dan kontekstual. Dengan melihat Sahabat sebagai komunitas historis yang dinamis, bukan sebagai simbol monolitik, umat Islam dapat membangun cara pandang baru terhadap otoritas, perbedaan, dan kehidupan beragama di era modern. Penelitian lanjutan dapat diarahkan pada pemetaan wacana keagamaan kontemporer dengan menggunakan kerangka historiografi Islam awal untuk membaca fenomena sosial-politik umat Islam hari ini secara lebih tajam dan relevan.

E. References

- Alkhotob, I. T. (2018). *Kaderisasi Pada Masa Rasulullah*. 1(1).
- Berger, P. L. (n.d.). *The Social Construction of Reality Treatise in the Sociology*.
- Donner, F. M. (2010). *Muhammad And The Believers at The Origins of Islam*. Harvard University press.
- Fadlilah, N. (2012). Keadilan Sahabat Nabi dalam Perspektif Fuad Jabali. *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, 2, 107–110.
- Foucault, M. (1977). *Power/Knowledge* (C. Gordon (ed.)). Pantheon Books.
- Ginannafsih, A. (2024). The History of Political Ethics and its Relationship with Islam. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(2), 1–5.
- Hidayah, N. (2015). Posisi Teori I' jâz Al-Qur ' ân ' Âisyah Abdurrahmân Bintu Al-Syâthi ' dan Sumbangannya dalam Kajian Al-Qur ' an. *An-Nur Jurnal Studi*

Islam, VII(2), 1–222.

Hirschler, K., & Brown, J. A. C. (n.d.). *Hadith: Muhammad ' s Legacy in the Medieval and Modern World . (Foundations of Islam .) xii , 308 pp . Oxford : Oneworld Publications , 534–536.*
<https://doi.org/10.1017/S0041977X10000467>


Maulidan, A. C., Rhamadan, F. S., Rahma, D., Indonesia, U. P., Sufyan, A., Saw, M., & Dia, M. (2024). Sejarah Peradaban Bani Umayyah dan Pengaruhnya Terhadap Penyebaran Islam di Nusantara. *Jurnal Artefak*, 11(September), 159–180.

Motzki, H. (2010). *Analysing Muslim Traditions*.

Nurdin, N. dkk. (2024). Ali bin Abi Thalib : Kebijakan Politik dan Peristiwa Tahqim antara Ali dan Mu ' awiyah bin Abi Sufyan. *Ulil Albab: Jurnla Ilmiah Multidisiplin*, 4(1), 208–218.

Suhail, A. K., Lintang, D., Pahrudin, A., & Oktaviano, W. (2025). AZYUMARDI AZRA DAN MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA. *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 19(2), 737–754.

Udin, A., & Fitriyadi, M. (2023). Tinjauan Historis Ilmu Hadis dan Kodifikasinya. *Dirayah: Jurnal Ilmu Hadis*, 3(2).

DOI, Copyright, and License	DOI: Copyright (c) 2025 author(s) name This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License 
How to cite	Authors, Name of. "The Title of the Article." <i>El Makrifah: Jurnal Ilmiah sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Makrifatu ilmi Bengkulu Selatan</i> , no. 1 (2024): 33-48.